

**EVALUASI REFORMASI BIROKRASI**  
**PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR BANDA ACEH KELAS IA**  
*FORMULIR ISIAN PENGADILAN (Kelengkapan Evidence)*

**Area I. MANAJEMEN PERUBAHAN**

<b>No</b>	<b>Materi</b>	<b>Kondisi</b>	<b>Solusi</b>	<b>Data Dukung</b>
1.	Sosialisasi Reformasi Birokrasi.	Sudah dilaksanakan	Sosialisasi selalu ditindaklanjuti dan ditekankan dalam setiap rapat/ pertemuan.	- <u>Foto Kegiatan sosialisasi RB</u> - <u>Notulen Rapat Sosialisasi RB.</u>
2.	Tim Reformasi Birokrasi di Pengadilan	TIM RB sudah ada dan saat ini sudah diperbarui dengan SK terbaru	Perubahan SK Tim selalu menyesuaikan mutasi Hakim dan pegawai yang ada.	- <u>SK Pembentukan TIM RB PN Banda Aceh</u> -
3.	Sosialisasi Road Map.	Sosialisasi Road Map sudah dilaksanakan di PN Banda Aceh seiring dengan sosialisasi RB.	Sosialisasi selalu ditindaklanjuti dan ditekankan dalam setiap rapat/ pertemuan.	- <u>Notulen Rapat Sosialisasi Road Map.</u> - <u>Foto Kegiatan Sosialisasi Road Map.</u>
4.	Pemilihan Role Model.	Sudah dilaksanakan pemilihan Role Model di PN Banda Aceh	Role Model dipilih dan dilakukan evaluasi sesuai dengan standarisasi pelaksanaan pemilihan Role Model yang telah ditentukan Mahkamah Agung.	- <u>SK Role Model.</u> - <u>Foto Role Model.</u>

5.	Publikasi Kegiatan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.	Sudah dilakukan publikasi kegiatan dan Pelaksanaan RB melalui website	Setiap kegiatan dipublikasikan pada hari itu juga	Adanya bundel contain website
6.	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja.	Sudah ada/ tertanam Pola Pikir dan Budaya Kerja pada seluruh SDM di PN Banda Aceh sesuai standar Akreditasi dan Penjaminan Mutu Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, terbukti dengan sudah diusulkannya Akreditasi ke Dirjen Badilum untuk PN Banda Aceh sejak .....	Penanaman Pola Pikir dan Budaya Kerja selalu ditekankan dalam setiap rapat/ pertemuan.	- <u>Absensi keterlibatan pimpinan maupun seluruh SDM dalam pelaksanaan RB.</u>
7.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.	belum dilakukan	Akan dilakukan rapat monitoring dan evaluasi internal Tim RB PN Banda Aceh setiap tahunnya.	- <u>Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RB PN Banda Aceh</u>

Area II. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No	Materi	Kondisi	Solusi	Data Dukung
1	<p>Sosialisasi peraturan perundang-undangan terbaru di MA :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang gugatan sederhana</li> <li>b. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</li> <li>c. PERMA Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.</li> <li>d. PERMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya.</li> <li>e. PERMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (<i>Whistleblowing System</i>) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.</li> <li>f. PERMA Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.</li> <li>g. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara perempuan berhadapan dengan hukum.</li> <li>h. PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang restitusi terhadap anak berhadapan hukum</li> </ul>	<p>Sosialisasi sudah dilakukan baik secara internal maupun eksternal pada setiap adanya peraturan perundang-undangan terbaru di MA. Selain melalui mekanisme rapat/pertemuan, sosialisasi juga dilakukan melalui website dan WhatshApp</p>	<p>Selain dengan adanya sosialisasi, pemantapan pemahaman materi juga selalu ditekankan pada setiap pertemuan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh</p>	<p>-</p> <p>- Notulen dan daftar hadir Sosialisasi PERMA Nomor 7, 8, dan 9 Tahun 2016</p>
2	<p>Evaluasi pelaksanaan <i>system</i> pengendalian peraturan perundangan-undangan</p>	<p>Belum dilakukan evaluasi secara periodik terhadap produk kebijakan Ketua</p>	<p>Segera akan dilakukan evaluasi secara periodik terhadap produk</p>	
3	<p>Evaluasi SK Ketua Pengadilan terhadap kebijakan Mahkamah Agung terbaru dan Peraturan Daerah terkait hukum dan teknis judisia</p>	<p>Belum dilakukan evaluasi SK Ketua Pengadilan terhadap kebijakan Mahkamah Agung terbaru dan Peraturan Daerah</p>	<p>Segera akan dilakukan evaluasi terhadap SK Ketua Pengadilan terhadap kebijakan Mahkamah Agung terbaru</p>	<p>SK Ketua Pengadilan terbaru terkait dengan kebijakan baru MA</p>
4	<p>Harmonisasi Penetapan SK radius di pengadilan terkait</p>	<p>Belum dilakukan.</p>	<p>Akan dilakukan</p>	<p>SK KPN Biaya Perkara</p>

5	Implementasi JDIH di Pengadilan	Aplikasi JDIH PN Banda Aceh secara mandiri . namun belum di isi , dikarenakan belum ada SK		
6	Tim Pengelola JDIH di Pengadilan	Belum ada karena menyatu dengan SK Tim IT.	Akan segera ditindaklanjuti membentuk SK tersendiri.	

### LAPORAN POKJA REFORMASI BIROKRASI PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI (AREA III)

No	PERSIAPAN MATERI	KONDISI	SOLUSI	DATA DUKUNG/EVIDENCE
1	Evaluasi Untuk Menilai Ketepatan Fungsi Dan Ukuran Organisasi.	Sudah dievaluasi struktur jabatan yang ada telah terpenuhi dan setiap tingkatannya telah menjalankan fungsi-fungsi sesuai dengan keahliannya, sehingga semua unsur pekerja dapat melaksanakan pekerjaannya secara profesional	Evaluasi setiap waktu apabila diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur Organisasi</li> <li>2. Uraian Tugas masing - masing pegawai</li> <li>3. Foto evaluasi pokja area 3.</li> </ol>
2	Evaluasi Yang Mengukur Jenjang Organisasi Kepada Seluruh Unit Organisasi.	Sudah dievaluasi apakah hirarki atau tingkatan organisasi sudah ideal yang didalamnya terdapat pejabat, tugas serta wewenang	Evaluasi setiap waktu apabila diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur Organisasi</li> <li>2. Uraian Tugas masing - masing pegawai</li> <li>3. Foto evaluasi pokja area 3.</li> </ol>
3	Evaluasi Yang Menganalisis Kemungkinan Dupliasi Fungsi Kepada Seluruh Unit Kerja.	Sudah dievaluasi tentang analisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada seluruh unit kerjanya	Evaluasi setiap waktu apabila diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur Organisasi</li> <li>2. Uraian Tugas masing - masing pegawai.</li> <li>3. Foto evaluasi pokja area 3.</li> </ol>
4	Evaluasi Yang Menganalisis Satuan Organisasi Yang Berbeda Tujuan Namun Ditempatkan Dalam Satu Kelompok Kepada Seluruh Unit Kerja	Sudah dievaluasi tentang analisis Satuan Organisasi yang berbeda tujuan dalam kelompok	Evaluasi setiap waktu apabila diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur Organisasi</li> <li>2. Uraian Tugas masing - masing pegawai</li> <li>3. Foto evaluasi pokja area 3.</li> </ol>
5	Evaluasi Yang Menganalisis Kemungkinan Adanya Pejabat Yang Melapor Kepada Lebih Dari Seorang Atasan Pada Seluruh Unit Kerja	Sudah dievaluasi apakah didalam sistem terdapat kewajiban bahwa setiap pejabat wajib melapor kepada lebih dari satu orang atasan	Evaluasi setiap waktu apabila diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur Organisasi</li> <li>2. Uraian Tugas masing - masing pegawai</li> <li>3. Foto evaluasi pokja area 3.</li> </ol>
6	Evaluasi Yang Menganalisis Kesesuaian Struktur Organisasi	Sudah dievaluasi analisis kesesuaian Struktur Organisasi dengan Kinerja yang akan dihasilkan	Evaluasi setiap waktu apabila diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur Organisasi</li> <li>2. Uraian Tugas masing -</li> </ol>

	Dengan Kinerja Yang Akan Dihasilkan Kepada Seluruh Unit Kerja			masing pegawai 3. Foto evaluasi pokja area 3.
7	Evaluasi Atas Kesesuaian Struktur Organisasi Dengan Mandat Kepada Seluruh Unit Kerja.	Sudah dievaluasi analisis kesesuaian Struktur Organisasi dengan Mandat	Evaluasi setiap waktu apabila diperlukan	1. Struktur Organisasi 2. Uraian Tugas masing - masing pegawai 3. Foto evaluasi pokja area 3.
8	Evaluasi Yang Menganalisis Kemungkinan Tumpang Tindih Dengan Instansi Lain.	Sudah dievaluasi analisis kemungkinan Tumpang Tindih dengan Instansi lain	Evaluasi setiap waktu apabila diperlukan	1. Struktur Organisasi 2. Uraian Tugas masing - masing pegawai 3. Foto evaluasi pokja area 3.
9	Evaluasi Penguatan Organisasi Berdasarkan Perma 07 Tahun 2015	Sudah dievaluasi penguatan Organisasi Berdasarkan Perma 07 Tahun 2015	Evaluasi setiap waktu apabila diperlukan	1. Struktur Organisasi 2. Uraian Tugas masing – masing pegawai 3. Foto evaluasi pokja area 3.

**Area IV : PENATAAN TATA LAKSANA**

NO.	PERSIAPAN MATERI	KONDISI	SOLUSI	DATA DUKUNG/EVIDENCE
	<b>Area IV : Penataan Tata Laksana</b>			
1	<b>Peta proses bisnis</b> , yang menggambarkan visi, misi, strategi teknis cara meraihnya, serta <i>out put</i> dan <i>out come</i> yang diharapkan.	Sudah ada, berikut kebijakan mutu dan sasaran mutu dan peningkatan pelayanan berupa inovasi	Evaluasi setiap waktu apabila diperlukan	Undangan rapat, daftar hadir, rumusan keputusan
2	<b>Standard Operating Prosedure (SOP)</b> , ketata laksanaan birokrasi yang terstandard, terukur dari segi waktu, tempat, dan penanggung jawab (sesuai dengan struktur organisasi baru perma 7 tahun 2015)	Bahwa pelaksanaan pelayanan sudah sesuai dengan SOP	-	Tidak ada data dukung karena tidak pernah ada rapat review SOP
3	<b>Monitoring pelaksanaan SOP</b> dalam pelayanan dan ketatalaksanaan.	Sudah ada monitoring oleh masing - masing Hakim Pengawas Bidang	Evaluasi setiap waktu apabila diperlukan	Undangan rapat bulanan, daftar hadir, notulen rapat, laporan hasil monitoring
4	<b>E-government</b> (pelayanan pemerintah kepada publik berbasis elektronik, dengan tujuan transparansi). (cetak biru ma 2010-2035 - arahan strategis pengembangan IT di lingkungan MA)	Sudah ada ( inovasi SIMPATI : SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA TILANG) melalui aplikasi E-Tilang,	Evaluasi setiap waktu apabila diperlukan	1. Website PN Banda Aceh 2. Direktori Putusan 3. Aplikasi Tilang
5	Keterbukaan Informasi Publik (SK KMA 1-144)	Sudah ada ( Penanganan Informasi dan Pengaduan)	Evaluasi setiap waktu apabila diperlukan	Meja Informasi dan Pengaduan

Area 5 : Penataan Sistem Manajemen SDM APARATUR

NO.	PERSIAPAN MATERI	KONDISI	SOLUSI	DATA DUKUNG / EVIDENCE
1.	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Analisa jabatan dan kebutuhan Pegawai sampai saat ini belum ada	akan dibentuk tim penyusun analisa jabatan dan kebutuhan pegawai	
2.	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Melakukan kegiatan atau pelatihan dan sosialisasi sesuai dengan kebutuhan jabatan dan pegawai	Mengusulkan Pegawai untuk mengikuti pelatihan sesuai dengan tupoksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Baperjakat</li> <li>• Berita Acara Baperjakat</li> <li>• Pengiriman Pegawai untuk dikirim mengikuti Pelatihan/Pembinaan</li> </ul>
3.	Penetapan Kinerja Individu	Kinerja Individu diterapkan kepada seluruh pegawai	Penetapan kinerja dilakukan setiap awal tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Renstra</li> <li>• PKT</li> <li>• Evaluasi Periodik</li> <li>• SKP</li> </ul>
4.	Penegakan aturan disiplin / kode etik kode perilaku pegawai	Sudah ada kode etik sebagai pedoman bagi pegawai teknis dan non teknis tetapi belum dilaksanakan secara optimal	Sosialisasi kode etik , peraturan disiplin pegawai dan pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) Daftar hadir Pembinaan</li> <li>b) Notulen rapat</li> <li>c) Penetapan Role Model</li> <li>d) Pakta Integritas</li> </ol>
5.	Sistem Informasi Kepegawaian	Data SIKEP sudah updating		<ol style="list-style-type: none"> <li>a) Dokumen Pegawai</li> <li>b) SK Penunjukan Admin SIKEP</li> <li>c) Monitoring kelengkapan data</li> </ol>

## Area VI : PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA AREA (VI)

No	Materi	Kondisi	Solusi	Data Dukung
1.	<u>Pimpinan terlibat secara langsung dalam hal :</u>			
	- Penyusunan Renstra.	Pimpinan sudah terlibat dalam kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Renstra		- <u>Dokumen Renstra.</u>
	- Penyusunan Penetapan Kinerja.	Pimpinan sudah terlibat dalam kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Penetapan Kinerja		- Dokumen Penetapan kinerja.
	- Pemantauan Pencapaian kinerja.	Pemantauan dilakukan melalui kegiatan Laporan Bulanan, Triwulan, Semester maupun Tahunan yang disampaikan tepat waktu.		- <u>Dokumen Laporan Perkara (format SIPP).</u>
2.	<u>Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja:</u>			
	- Adanya upaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani Akuntabilitas Kinerja.	PN Banda Aceh selalu mendelegasikan SDM dalam program-program terkait Akuntabilitas Kinerja yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI.		
	- Telah tersusunnya Pedoman Akuntabilitas Kinerja.	PN Banda Aceh telah melaksanakan sesuai Pedoman Akuntabilitas Kinerja dari Mahkamah Agung RI.		- <u>Dokumen LKJIP PN Banda Aceh</u>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem Pengukuran Kinerja telah dirancang berbasis elektronik.</li> </ul>	<p>PN Banda Aceh telah mengimplementasikan aplikasi SIPP sesuai dengan tugas kewajiban dan tanggung jawab masing-masing user SIPP.</p> <p>Aplikasi KOMDANAS juga sudah diimplementasikan dengan baik oleh PN Banda Aceh sebagai pendukung pelaksanaan akuntabilitas kinerja.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Dokumen Laporan SIPP.</u></li> <li>- <u>Laporan dari aplikasi KOMDANAS.</u></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh seluruh unit.</li> </ul>	<p>Aplikasi SIPP , KOMDANAS sudah dapat diakses oleh seluruh pegawai/ SDM sesuai tupoksi user masing-masing.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Dokumen Laporan SIPP.</u></li> <li>- <u>laporan dari aplikasi KOMDANAS.</u></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala.</li> </ul>	<p>Aplikasi SIPP selalu diisi/ update setiap hari sedangkan KOMDANAS diinput sesuai jadwal oleh seluruh pegawai/ SDM sesuai tupoksi user masing-masing.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Dokumen Laporan SIPP.</u></li> <li>- <u>Laporan dari aplikasi KOMDANAS.</u></li> </ul>

## Area VII. PENGUATAN PENGAWASAN

No	Materi	Kondisi	Solusi	Data Dukung
1.	Kebijakan penanganan gratifikasi dan sosialisasi.	Sudah adanya banner slogan anti-gratifikasi di PN Banda Aceh.		- <u>Banner slogan anti-gratifikasi.</u>
2.	Implementasi dan Evaluasi Penanganan Gratifikasi.	Sudah ada karena SK Penanganan Gratifikasi		SK
3.	Peraturan Pimpinan organisasi tentang SPIP.	Belum ada.	Akan segera ditindaklanjuti.	
4.	Telah dibangun lingkungan pengendalian.	Belum ada.	Akan segera ditindaklanjuti.	
5.	SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait.	Belum ada.	Akan segera ditindaklanjuti.	
6.	Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat.	Sudah ada SK KPN Tentang Petugas Meja Pengaduan yang terintegrasi dengan SIWAS MARI.		- <u>SK KPN Tentang Petugas Meja Pengaduan.</u> - <u>Alur Penanganan Pengaduan.</u>

7.	Penanganan pengaduan masyarakat telah disosialisasikan dan diimplementasikan.	Sudah dilakukan Sosialisasi alur pengaduan kepada Masyarakat Pencari Keadilan. Untuk implementasi belum ada dikarenakan tidak ada pengaduan di PN		- Banner alur pengaduan masyarakat.
8.	Telah terdapat kebijakan Whistle Blowing System.	Belum ada	Akan segera ditindaklanjuti	
9.	Whistle Blowing System telah Disosialisasikan.	Belum ada.	Akan segera ditindaklanjuti.	
10.	Whistle Blowing System telah diimplementasikan.	Belum ada.	Akan segera ditindaklanjuti.	
11.	Telah terdapat kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan.	Sudah ada SK		SK
12.	Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan.	Sudah ada.	Akan segera ditindaklanjuti.	
13.	Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti.	Belum ada.	Akan segera ditindaklanjuti.	
14.	Telah dilakukan penancangan zona integritas.	Sudah ada penancangan zona integritas baik secara internal maupun eksternal.		- <u>Banner penancangan zona integritas.</u> - <u>Piagam penancangan zona integritas.</u> - SK KPN tentang <u>Penancangan Zona Integritas.</u>

**Area VIII. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

No	Materi	Kondisi	Solusi	Data Dukung
1.	Adanya kebijakan standar pelayanan mengacu pada SK KMA No. 026 Tahun 2012.	<p>Sudah ada kebijakan standar pelayanan yang mengacu pada SK KMA No. 026 Tahun 2012, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya Meja Informasi dan Pengaduan di PN Banda Aceh</li> <li>- Adanya Pelayanan Posbakum dengan dasar MoU antara PN Banda Aceh dengan LBH</li> <li>- Tersedianya ruang mediasi , kaukus, laktasi dan teleconference.</li> <li>- Standar Pelayanan lainnya sudah dituangkan di dalam SOP Banda Aceh.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Foto Meja Informasi dan Pengaduan di PN Banda Aceh</u></li> <li>- <u>Alur Pengaduan.</u></li> <li>- <u>MoU Posbakum.</u></li> <li>- <u>Foto Ruang Mediasi dan teleconference.</u></li> <li>- <u>SOP PN Banda Aceh.</u></li> <li>- <u>SK Ketua tentang Standar Pelayanan.</u></li> </ul>
2.	Maklumat Standar pelayanan (untuk semua jenis pelayanan).	PN Banda Aceh sudah mensosialisikan dan memasang Maklumat Standar Pelayanan.	Dipasang di area strategis.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Banner Maklumat Standar Pelayanan PN Banda Aceh</u></li> </ul>

3.	SOP bagi Pelaksanaan Standar Pelayanan.	PN Banda Aceh sudah memiliki SOP. Baik SOP Pelayanan Utama maupun SOP Pelayanan Pendukung.	-	- <u>SOP PN Banda Aceh</u>
5.	Sosialisasi/pelatihan Budaya Pelayanan Prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima).	Pengadilan sudah melakukan sosialisasi budaya pelayanan prima secara personal maupun dalam setiap kesempatan kepada petugas yang terkait dengan pelayanan publik.	Perlu ada pelatihan khusus yang terkait bidang kehumasan dan pelayanan prima.	- Banner Kode Etik Hakim, panitera pengganti
6.	Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media.	Pengadilan sudah menginformasikan ke publik mengenai informasi pelayanan pengadilan baik melalui website, banner informasi perkara yang terpasang di Pengadilan, brosur yang disediakan, desk info monitor/ digital.		- Website: <u><a href="http://www.pn-bandaaceh.go.id">www.pn-bandaaceh.go.id</a></u> - <u>Banner alur informasi perkara perdata dan pidana.</u> - <u>Brosur informasi.</u> - <u>Gambar Monitor desk info.</u>

7.	Terdapat Sistem punishment(sanksi)/reward (penghargaan).	Sistem masih dalam bentuk lisan dari pimpinan yang menyampaikan adanya sanksi bagi pegawai yang melanggar aturan dan penghargaan bagi pegawai yang berprestasi. Untuk punishment (sanksi) belum ada.	Akan diadakan pemberian reward (penghargaan) kepada pegawai pada setiap acara peringatan Hari Kemerdekaan RI.	
8.	Sarana layanan terpadu/terintegrasi.	Pengadilan sudah memiliki sarana layanan terpadu yaitu melalui aplikasi SIPP dan Sistem Pelayanan Terpadu satu pintu (PTSP)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Aplikasi SIPP.</u></li> <li>- Meja Pelayanan PTSP</li> </ul>

9.	Terdapat inovasi pelayanan.	<p>PN Banda Aceh sudah melakukan inovasi-inovasi pelayanan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah menerapkan <i>one day service</i> sesuai yang tertuang dalam Sasaran Mutu Pelayanan.</li> <li>- Pelayanan untuk Pelanggar Tilang secara digital, aplikasi yang tersedia.</li> <li>- Sudah menerapkan pelayanan meja <i>one stop service</i> PTSP</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Dokumen Sasaran Mutu PN Banda Aceh</u></li> <li>- <u>Foto banner <i>one day service</i>.</u></li> <li>- Aplikasi Denda Tilang PN Banda Aceh.</li> <li>- <u>Foto Meja Pelayanan <i>one stop service</i>.</u></li> </ul>
10.	Terdapat media pengaduan pelayanan.	Adanya kotak pengaduan, formulir pengaduan, Aplikasi SIWAS yang disediakan di Meja Pengaduan.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir pengaduan</li> <li>- <u>Foto kotak pengaduan, aplikasi SIWAS.</u></li> </ul>
11.	Terdapat SOP pengaduan pelayanan.	Belum ada SOP Pengaduan hanya ada alur pengaduan.	Akan segera dibuat SOP Pengaduan Pelayanan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Foto Alur Pengaduan.</u></li> </ul>

12.	Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan.	Ada Meja Pengaduan dan Petugas Pengaduan sesuai SK KPN.		- <u>Foto Meja Pengaduan.</u> - <u>SK KPN Petugas Pengaduan.</u>
13.	Tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan.	Sampai saat ini tidak ada Pengaduan yang masuk sehingga tidak ada tindaklanjut.		
14.	Telah dilakukan Evaluasi atas penanganan keluhan.	Sampai saat ini tidak ada Pengaduan/ keluhan yang masuk sehingga tidak ada tindaklanjut.		
15.	Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.	Sudah ada sesuai jalannya Sistem Akreditasi dan Penjaminan Mutu		- <u>Dokumen Laporan Hasil Laporan Survey.</u>
16.	Publikasi Hasil Survey kepuasan Masyarakat.	Sudah dipublikasi di website PN Banda Aceh		- <u>Gambar Website PN Banda Aceh yang telah mempublikasikan Dokumen Laporan Hasil Laporan Survey.</u>
17.	Tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.	Sudah ditindaklanjuti terutama mengenai sarana prasarana kantor terkait kenyamanan masyarakat.	Untuk memenuhi kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan dengan mengoptimalkan sarana prasarana yang sudah ada.	Foto tempat untuk charger hp.

18.	Rencana penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik.	Belum ada karena tenaga IT yg profesional sedang tugas belajar di UGM dari tahun 2016 sehingga berkenaan dengan IT dilaksanakan oleh jurusita dan honorer.		
19.	Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus.	PN Banda Aceh telah melakukan perbaikan, pengembangan secara berkelanjutan terhadap pelayanan publik melalui berbagai inovasi dan melaksanakan program-program pelayanan yang dibuat oleh Mahkamah Agung RI. Contoh: mengupdate website.		

Disusun oleh dan atas nama Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Banda Aceh:

1. SUWONO, S.H.SE,M,Hum, (Ketua Tim Sekretariat)
2. AINAL MARDHIAH, S.H., M.H (Wakil ketua Tim Sekretariat)
3. SYARIFUDDIN, S.H. (Sekretaris TIM Sekretariat)
4. TANWIMAN SYAM, S.H. dan RIDWAN, S.H., M.H. (Anggota Tim Sekretariat)
2. RONI SUSANTA, S.H. , H. SUPRIADI, S.H., M.H. dan SAYED KHADIMSYAH, S.H.(Ketua Kelompok Kerja Area I )
3. RAHMAWATI, S.H. dan JUANDRA, S.H. (Ketua Kelompok Kerja Area II)
4. CAHYONO, S.H., M.H. dan NURMIATI, S.H. (Ketua Kelompok Kerja Area III)
5. NANI SUKMAWATI , S.H.,.M.H dan DENY SYAHPUTRA, S.H., M.H (Ketua Kelompok Kerja Area IV)
6. FAISAL MAHDI, S.H., M.H. dan ELVIYANTI PUTRI, S.H., M.H. (Ketua Kelompok Kerja Area V)
7. NGATEMIN, S.H., M.H dan MUZAKIR, S.H., M.H (Ketua Kelompok Kerja Area VI)
8. TOTOK YANUARTO, S.H.MH., ETI ASTUTI, S.H., M.H. dan MARDEFNI, S.H., M.H (Ketua Kelompok Kerja Area VII)
9. DR. EDWAR, S.H.M.H . , M. FATAN RIYADI, S.H dan AYI AFRIYANTO, S.H ( Ketua Kelompok Area VIII).